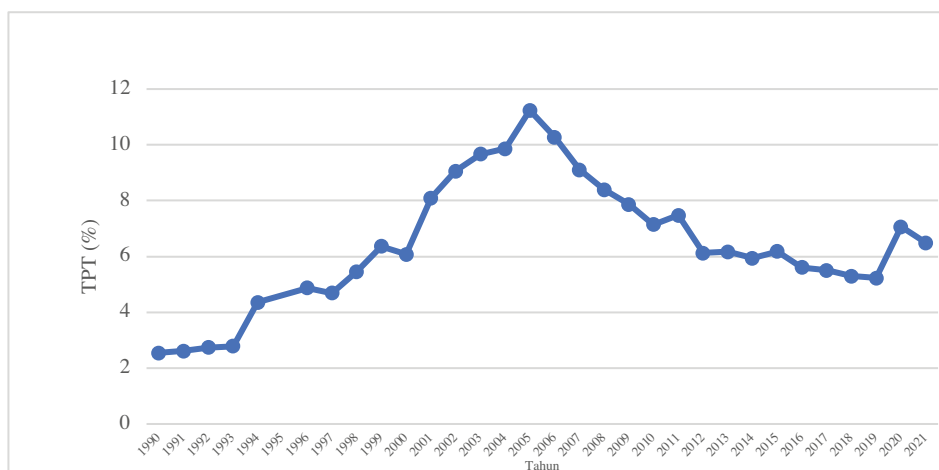


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang sering dihadapi oleh suatu negara adalah pengangguran. Data dari World Bank pada tahun 2020 menunjukkan bahwasanya tingkat pengangguran di Indonesia berada pada urutan keempat diantara anggota negara anggota ASEAN lainnya setelah Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia dengan persentase tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 4,11 persen (World Bank, 2020). Kondisi tingkat pengangguran di Indonesia sendiri berdasarkan berita resmi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia terus mengalami penurunan.



Gambar 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Dari gambar diatas ini dapat kita ketahui bahwasanya tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 1994 hingga 2004, namun pada tahun berikutnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus mengalami penurun yang cukup signifikan. Walaupun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali mengalami kenaikan dikarenakan adanya

pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sektor tanpa terkecuali, salah satunya yaitu sektor ketenagakerjaan (BPS, 2020). TPT di Indonesia periode Agustus 2020 mencapai 7,07 persen, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 5,23 persen.

Namun apabila ditinjau lebih lanjut dari segi pendidikan, lebih dari separuh jumlah pengangguran adalah mereka dengan status pendidikan yang tergolong terdidik yaitu mereka yang berpendidikan SMA ke atas. Apabila lebih diperinci lagi, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan yang konsisten dengan nilai yang cukup tinggi dari tahun ke tahun adalah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tingginya angka pengangguran yang berasal dari lulusan SMK perlu diperhatikan lebih lanjut karena hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dari pendidikan SMK yaitu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk memasuki dunia kerja. Tingginya tingkat pengangguran yang berasal dari tingkat pendidikan SMK ini menandakan adanya permasalahan titik temu antara tawaran (*supply*) tenaga kerja lulusan SMK dengan permintaan (*demand*) tenaga kerja, karena dengan keterampilan yang dimilikinya lulusan SMK diharapkan siap untuk memasuki lapangan kerja.



Gambar 1. 2

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Pemerintahan Indonesia dalam hal yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran terdidik, meluncurkan program yang bernama Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Usulan ini termasuk didalamnya untuk meningkatkan jumlah proporsi SMK dan SMA menjadi 50:50 pada tahun 2015, 60:40 pada tahun 2020, dan nantinya pada tahun 2025 menjadi 70:30 (Kemendikbud, 2007). Selain itu dalam upaya menambah jumlah SMK pembangunan SMA baru diberhentikan, beberapa SMA yang sudah mapan diubah menjadi sekolah kejuruan. Dari tahun 2018 hingga 2020, terdapat 591 SMK baru dibangun, pada tahun 2020 jumlah SMK di Indonesia mencapai 14.301 sekolah lebih banyak dibandingkan dengan SMA pada tahun yang sama terdapat 13.939 sekolah (Kemendikbud, 2020)

Pembangunan Sumber Daya Manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu pilar visi Indonesia 2045, visi 2045 tersebut menargetkan proporsi tenaga kerja mencapai 90% untuk lulusan pendidikan menengah keatas dan meningkatkan pendidikan vokasi yang berorientasi pada *demand-driven*. Hal ini patut diapresiasi karena mencocokkan SMK dengan permintaan pasar sama pentingnya mencocokkan SMK dengan potensi daerah. Pendidikan SMK yang berorientasi *demand-driven* ini dapat menghindari pekerjaan yang sudah tidak ada lagi di daerah tersebut ataupun hasil pekerjaan yang kecil. Potensi daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya (Mukhasid, 2018).

Memperluas akses pendidikan kejuruan di negara berkembang bisa menjadi pilihan yang menarik bagi pembuat kebijakan di negara tersebut, terutama bagi negara yang ingin meningkatkan jumlah lapangan kerja. Pendidikan kejuruan diyakini dapat menghasilkan “*Specific Human Capital*” atau modal manusia tertentu karena sekolah kejuruan memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang relevan dengan pekerjaan tertentu yang dapat membuat mereka siap untuk pekerjaan tertentu dan menjadi lebih produktif (Tilak, 2002). Namun nyatanya, hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Banyak hasil studi

yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda tentang manfaat dari pendidikan kejuruan, contohnya di Tanzania pada tahun 1960-an dan Korea Selatan pada tahun 1990-an memprioritaskan SMK, namun hal tersebut gagal karena jumlah partisipan yang rendah. Hal ini dikarenakan orang tua lebih memilih anaknya untuk masuk ke SMA daripada SMK dan menolak menyekolahkan anaknya di SMK.

Masih menjadi perdebatan pula mengenai manfaat yang diperoleh dari pendidikan SMK, bukti empiris dari seluruh negara beragam hasilnya. Di Rusia (Blinova et al, 2015) SMK mampu mengurangi jumlah pengangguran, hal itu dikarenakan dengan adanya SMK meningkatkan angkatan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Penelitian yang dilakukan di Mesir (El-Hamidi, 2006), Israel (Neuman & Ziderman, 1991) dan Thailand (Moenjak & Worswick, 2003) para pekerja lulusan SMK mendapatkan upah premium. Sedangkan di Suriname (Horowitz & Schenzler, 1999) para pekerja lulusan SMA mendapatkan upah yang lebih tinggi dibanding dengan para pekerja lulusan SMK. Di Jerman (Lechner, 2000), Korea (Krivet, 2008), dan di Romania (Malamud & Pop-Eleches, 2008) tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara SMA dan SMK.

Hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia juga beragam, di Provinsi Jawa Timur variabel PDRB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Dan variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur (Prayitno & Kusumawardani, 2021). Selain itu terdapat hasil penelitian yang menyebutkan bahwasanya tiga tahun setelah lulus, para pekerja dengan lulusan SMA dan SMK memiliki upah dan pekerjaan yang serupa (Chen, 2009).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia sebagian besar hanya membahas masalah tingginya tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK dengan cakupan sebatas negara atau provinsi saja. Namun, pada penelitian ini dilakukan pembagian wilayah Indonesia menjadi dua wilayah, yakni wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB) dan wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT). Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas fenomena tingkat

pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia, apakah masalah tingginya tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK adalah permasalahan yang terjadi secara menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia ataukah hanya di beberapa wilayah provinsi tertentu saja. Wilayah IBB mencakup seluruh provinsi yang berada di Sumatra dan Jawa dengan total 20 provinsi, sedangkan wilayah IBT mencakup seluruh provinsi yang berada di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan total 13 provinsi.

Sehingga dengan adanya berita resmi statistik dan juga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat masalah yang sedang dialami oleh dunia pendidikan di Indonesia yang mana seharusnya pendidikan SMK merupakan pemasok tenaga kerja terampil bukan sebagai penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia, fakta tersebut dapat diartikan adanya masalah atau ketidakseimbangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan di Indonesia. Untuk itu diperlukan penelitian secara kuantitatif antara jumlah lulusan SMK, GDP deflator (inflasi), dan UMP rill dengan tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia, untuk mengetahui hubungan antar variabel yang dipresentasikan dalam bentuk perhitungan matematis.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara, Blinova et al., (2015) di Rusia, Blaak Openjuru & Zeelen (2013) di Uganda, Forster & Bol (2017) di Belanda, dan Shavit & Muller (2000) di Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Swiss, Taiwan, dan Amerika Serikat. Dari keempat penelitian tersebut diketahui bahwa sekolah kejuruan mampu mengurangi pengangguran usia muda hal ini dikarenakan sekolah kejuruan meningkatkan angkatan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.

Studi serupa yang membahas mengenai pengaruh jumlah lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mayoritas menggunakan sumber data mikro dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) seperti penelitian yang dilakukan oleh Newhouse & Suryadarma (2011) yang menunjukkan bahwa jenis sekolah sangat mempengaruhi hasil pasar tenaga kerja dan tidak ada satupun hasil temuan yang mendukung upaya pemerintah untuk memperluas sekolah kejuruan. Studi ini akan menganalisis permasalahan yang sama dengan menggunakan data makro karena penggunaan data makro memiliki keuntungan lebih mudah untuk diakses dari data mikro. Selain itu penggunaan data makro juga sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis tentang pengaruh suatu kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis masalah tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia keseluruhan, tetapi juga membagi Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu Indonesia Bagian Barat (IBB) yang terdiri dari seluruh provinsi di Sumatera dan Jawa yang berjumlah 20 provinsi. Dan Indonesia Bagian Timur (IBT) yang mencakup seluruh provinsi di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan total 13 provinsi. Tujuan dari pembagian wilayah ini adalah untuk lebih menjelaskan fenomena pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di wilayah tersebut yang tidak dapat kita abaikan begitu saja karena sangat penting bagi pengembangan strategi pembangunan sosial ekonomi daerah dan program ketenagakerjaan daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GDP deflator terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh UMP riil terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lulusan SMK, GDP deflator, dan UMP riil terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia berdasarkan pembagian wilayah.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan data panel dengan sampel data 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2012-2021 dengan menggunakan 3 variabel bebas yakni jumlah lulusan SMK, GDP deflator (inflasi), dan UMP riil untuk mengukur pengaruh SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan tiga metode yang dapat digunakan yaitu, *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam memilih estimasi terbaik diantara ketiga metode tersebut dilakukan dua cara yaitu Uji Chow atau Uji F-Statistik untuk memilih antara PLS dan FEM, dan Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya variabel jumlah lulusan SMK dan UMP riil berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia pada tahun 2012-2021. Sedangkan variabel GDP deflator (inflasi) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan wilayah, jumlah lulusan SMK, GDP deflator (inflasi), dan UMP riil berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di kawasan Indonesia Bagian Barat (IBT).

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi hasil riset tentang pengaruh lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan pendidikan terakhir SMK di Indonesia. Hasil studi dapat digunakan sebagai bagian dari literatur bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah dengan tingkat pengangguran lulusan SMK tertinggi serta bagi negara berkembang dalam menentukan program untuk pengentasan jumlah pengangguran.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika dari penulisan ini terdiri dari lima bagian yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, kelima bagian tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang permasalahan dari topik yang diteliti, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, serta ringkasan metode dan hasil penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang menjadi penunjang dari penelitian ini, studi terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknis analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi gambaran umum dari setiap variabel, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis. Pembahasan hasil penelitian merupakan fokus utama dari bab ini.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada terakhir yakni bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN